

ALTERNATIF PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN UNTUK USAHA MIKRO DI INDONESIA

Amelia Setiawan

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141
Email: amelias@unpar.ac.id

Gery Lusanjaya

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141
Email: gery.rafael@unpar.ac.id

Agus Hasan Pura Anggawijaya

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141
Email: aguspora@unpar.ac.id

ABSTRACT

Assessment of internal control can be the basis for external parties to establish cooperation with the entity being assessed. For example, when trying to make a loan, the bank can be helped by the existence of an assessment score on the application of the entity's internal control to assess the risk of the credit it will give. For investors, this valuation information can be used as supporting information when making investment decisions, for example in assessing operating efficiency, corporate governance and the sustainability assessment of the company. The assessment component for the Internal Control Assessment for Micro Businesses is divided into five domains, namely: 1. Control environment; 2. Risk Assessment; 3. Control Activities; 4. Information and Communication; and 5. Supervision. The assessment component uses 30 principles detailed with 150 indicators sourced from COSO's Internal Control Framework; Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies; and COBIT Maturity Assessment Model version 4.1.

Keywords: *Internal Control Assessment, COSO's Internal Control Framework, Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies, Maturity Assessment Model versi COBIT 4.1.*

ABSTRAK

Penilaian pengendalian intern dapat menjadi dasar bagi pihak eksternal yang sedang atau berencana untuk menjalin kerjasama dengan entitas yang dinilai. Misalnya, pada saat hendak memberikan pinjaman, pihak perbankan dapat terbantu dengan adanya skor penilaian atas penerapan pengendalian intern entitas tersebut untuk menilai risiko atas kredit yang akan diberikannya. Bagi investor, informasi penilaian ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung saat hendak membuat keputusan investasi misalnya dalam menilai efisiensi operasi, tata kelola perusahaan maupun penilaian keberlangsungan perusahaan tersebut. Komponen penilaian untuk Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro dibagi menjadi lima domain, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Aktivitas Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; dan 5. Pengawasan. Komponen penilaian menggunakan 30 prinsip yang dirinci dengan 150 indikator yang bersumber COSO's Internal Control Framework; Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies; dan Maturity Assessment Model versi COBIT 4.1.

Kata Kunci: *Penilaian pengendalian intern, COSO's Internal Control Framework, Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies, Maturity Assessment Model versi COBIT 4.1.*

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian dari negara-negara di ASEAN adalah kerjasama antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun pernyataan tersebut didasarkan kenyataan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Pernyataan tersebut didukung data bahwa sekitar 88,8-99,9 persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM, dan menyerap 51,7-97,2 persen tenaga kerja di ASEAN. Berdasarkan pada fakta tersebut, maka seharusnya UMKM mendapat porsi perhatian yang lebih besar dari para peneliti. Namun, seringkali fokus penelitian adalah perusahaan besar, terutama membahas mengenai pengendalian intern.

Setiap perusahaan yang didirikan di lingkungan bisnis, tidak bisa luput dari berbagai ancaman. Ancaman ini jika memanfaatkan kelemahan perusahaan maka akan menjadi risiko. Risiko inilah yang harus dikelola oleh perusahaan dengan berbagai respon terhadap risiko sesuai dengan tingkat kesediaan menerima risiko dari manajemen. Pengelolaan risiko berhubungan erat dengan pengendalian intern. Ada literatur yang menyebutkan bahwa pengelolaan risiko merupakan bagian dari pengendalian intern dan sebaliknya, pengendalian intern merupakan bagian dari pengelolaan risiko.

Pengendalian intern merupakan serangkaian proses yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di suatu organisasi untuk memberi keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian tercapai. Tujuan pengendalian intern di antaranya adalah keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisien operasi serta kesesuaian dengan peraturan. Kerangka kerja pengendalian intern yang paling banyak digunakan adalah COSO's Internal Control Framework yang dipublikasikan oleh Committee of Sponsoring Organization (COSO) yang merupakan organisasi gabungan dari berbagai organisasi yang berkaitan pengelolaan akuntan.

Selain COSO's Internal Control Framework, kerangka kerja pengendalian intern yang sering diterapkan bagi organisasi yang sarat penerapan teknologi informasi adalah kerangka kerja COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), yang merupakan kerangka kerja yang dipublikasikan oleh ISACA (Information Systems Audit and Control Association). Kerangka kerja ini pada umumnya menggunakan penilaian dengan maturity models yang menilai kematangan suatu proses teknologi informasi.

Dengan mengacu kepada kompleksitas kedua kerangka kerja tersebut, seringkali diasumsikan bahwa pengendalian intern hanya dapat dilaksanakan pada perusahaan besar yang sudah stabil, melakukan pengendalian yang memadai di organisasinya dan sarat dengan muatan teknologi informasi. Padahal secara prinsip, pengendalian intern seharusnya diterapkan pada semua organisasi tanpa dibatasi ukurannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat alat ukur alternatif yang dapat digunakan oleh usaha mikro. Alat ukur alternatif ini dirancang agar menghasilkan pengukuran yang relatif dikuantifikasikan dengan tujuan untuk dapat membandingkan satu usaha mikro dengan usaha mikro lainnya.

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (Republik Indonesia, 2008).

Selaras dengan UU no. 20/2008 tersebut, Bank Dunia menerbitkan kriteria penggolongan usaha mikro dengan menambahkan kriteria jumlah karyawan sebagai kriteria tambahan selain kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Adapun jumlah karyawan maksimal yang dapat dimiliki oleh suatu usaha agar dapat digolongkan sebagai usaha mikro adalah sembilan orang (International Finance Corporation, 2012).

Berdasarkan UU no. 20/2008 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bertujuan untuk memberdayakan UMKM dengan tujuan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (Republik Indonesia, 2008).

2. COSO's Internal Control-Integrated Framework

Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya untuk menyediakan tingkat keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian dalam kategori: (1) efektivitas dan efisiensi operasi; (2) keandalan laporan keuangan dan (3) kepatuhan pada aturan dan regulasi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2006). Framework COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission, 2011) meliputi lima komponen yaitu: (1) Control Environment; (2) Risk Assessment; (3) Control Activities; (4) Information and Communication dan (5) Monitoring Activities. Kelima komponen ini lah yang paling banyak diadopsi baik oleh

buku-buku teks di perguruan tinggi (Romney & Steinbart, 2009), (Moeller, 2009), (Hall, 2008) dan (Bodnar & Hopwood, 2010) dan juga dijadikan acuan oleh para auditor ekstern (Aldridge & Colbert, 1994).

3. Kerangka pikir pengendalian intern versi COBIT

Control Objective for Information and related Technology merupakan salah satu kerangka pikir pengendalian intern yang akhir-akhir ini banyak digunakan karena kerangka COBIT menekankan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perusahaan dan dianggap sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. COBIT dibuat oleh IT Governance Institute yang merupakan suatu organisasi nirlaba di Amerika yang berfokus pada tata kelola IT di organisasi. Terdapat berbagai versi kerangka COBIT, namun yang relevan dengan penelitian ini adalah COBIT versi 4.1.

COBIT versi 4.1 berasal dari kerangka COBIT yang dikembangkan pada tahun 1996 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2007 menjadi versi 4.1 atau dikenal dengan COBIT 4.1. Meski pada April 2012 telah diterbitkan kerangka COBIT yang terbaru, yaitu COBIT5, dan pada tahun 2019 diterbitkan 2019. Namun penggunaan COBIT versi 4.1 masih banyak digunakan di praktek. COBIT versi 4.1 terbagi menjadi empat domain, yaitu: (1) Align, Plan and Organize; (2) Build, Acquire and Implement; (3) Delivery, Service and Support dan (4) Monitoring, Evaluation and Assess. Keempat domain ini dibagi lagi menjadi 34 Process dan 210 Control Objective/Management Practice.

4. Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies

Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies merupakan suatu panduan yang diterbitkan oleh COSO yang ditujukan oleh perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan kecil. Panduan ini bertujuan untuk menyediakan prinsip dan atribut yang sejalan dengan COSO's Internal Control Framework, yang memungkinkan organisasi dengan ukuran apapun untuk memahami pentingnya penerapan pengendalian intern (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2006). Panduan ini merupakan panduan yang berdasarkan pada prinsip, oleh karenanya tidak ada kewajiban untuk mengikuti pernyataan yang tertera dalam panduan ini.

5. Maturity Model

Dalam arti luas, *Maturity model* digunakan untuk mendefinisikan tahapan atau tingkat yang mengukur kelengkapan objek yang dianalisis melalui serangkaian kriteria (multi-dimensi) yang berbeda (Vivares & Sarache, 2018). Pada awalnya, Maturity model dikembangkan dalam rangka meningkatkan pengembangan perangkat lunak yang mempertimbangkan aspek pengendalian dan proses pemeliharaan (Vivares & Sarache, 2018).

Pada tahun 2007, ISACA mengembangkan penerapan maturity model dalam COBIT 4.1 dengan berpatokan pada maturity model yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute yang menggunakan pengukuran dengan enam skala pengukuran (The IT Governance Institute, 2007). Maturity model untuk pengelolaan dan pengendalian proses TI didasarkan pada metode evaluasi organisasi, sehingga dapat dinilai dari tingkat kematangan mulai dari tidak ada (0) hingga dioptimalkan (5). Tujuan Maturity model versi COBIT 4.1 ini adalah untuk mengukur kinerja aktual perusahaan (untuk menentukan di mana posisi perusahaan saat ini), menilai status industri saat ini

(sebagai bahan perbandingan), target peningkatan perusahaan (The IT Governance Institute, 2007).

Terdapat berbagai penelitian yang menentukan berbagai level pengukuran, mulai dari tiga, hingga tujuh level pengukuran (Vivares & Sarache, 2018). Namun, dalam penelitian ini menggunakan enam level pengukuran dengan COBIT 4.1 sebagai patokan (The IT Governance Institute, 2007):

- a. Level 0 - Tidak ada: Tidak ada proses yang dapat dikenali. Perusahaan bahkan belum mengakui bahwa ada masalah yang harus diatasi.
- b. Level 1 - Awal / Ad Hoc: Ada bukti bahwa perusahaan telah mengakui bahwa masalah ada dan perlu ditangani. Belum ada proses standar dan penerapan penanganan masalah diterapkan pada individu atau kasus per kasus. Pendekatan keseluruhan untuk manajemen tidak terorganisir.
- c. Level 2- Berulang tapi Intuitif - Proses telah berkembang ke tahap di mana prosedur serupa diikuti oleh orang berbeda yang melakukan tugas yang sama. Tidak ada pelatihan formal atau komunikasi prosedur standar, dan tanggung jawab diserahkan kepada individu tersebut. Ada tingkat ketergantungan yang tinggi pada pengetahuan individu dan, oleh karena itu, kesalahan mungkin terjadi.
- d. Level 3 - Proses yang Terdefinisi: Prosedur telah distandarisasi dan didokumentasikan, dan dikomunikasikan melalui pelatihan. Proses wajib diikuti, namun kecil kemungkinan penyimpangan akan terdeteksi. Prosedur yang ada merupakan formalisasi dari praktik yang ada.
- e. Level 4 - Dikelola dan Terukur: Manajemen memantau dan mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan mengambil tindakan di mana proses tampaknya tidak berfungsi secara efektif. Proses sedang dalam perbaikan konstan dan memberikan praktik yang baik. Otomasi dan alat digunakan secara terbatas atau terfragmentasi.
- f. Level 5 - Dioptimalkan: Proses telah disempurnakan ke tingkat praktik yang baik dan berdasarkan hasil peningkatan berkelanjutan. Teknologi informasi digunakan secara terpadu untuk mengotomatisasi alur kerja, menyediakan alat untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas, membuat perusahaan cepat beradaptasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur. Adapun dalam penelitian ini digunakan tiga literatur utama, yaitu: 1. COSO's Internal Control Framework; 2. Internal Control over Financial Reporting –Smaller Public Companies; dan 3. Maturity Assessment Model versi COBIT 4.1. dalam pembuatan model.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model. Adapun model yang menjadi output penelitian ini adalah model penilaian penerapan pengendalian intern pada usaha mikro. Model ini dibuat dengan menggunakan indikator dan komponen yang berasal dari ke-tiga literatur utama.

PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Maturity Assessment Model versi COBIT 4.1 pada umumnya diterapkan pada perusahaan besar dengan kondisi operasi yang kompleks dan stabil. Jika diterapkan pada perusahaan kecil, maka kondisi ini akan menyebabkan munculnya hanya skor nol sampai

dengan dua pada penilaian ini. Kondisi nilai yang hampir seragam ini akan menimbulkan kesulitan membedakan nilai penerapan pengendalian antar entitas yang satu dengan yang lainnya.

Nilai penerapan pengendalian intern dapat menjadi dasar bagi pihak eksternal yang sedang atau berencana untuk menjalin kerjasama dengan entitas yang dinilai. Misalnya, pada saat hendak memberikan pinjaman, pihak perbankan dapat terbantu dengan adanya skor penilaian atas penerapan pengendalian intern entitas tersebut untuk menilai risiko atas kredit yang akan diberikannya. Bagi calon investor, informasi penilaian ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung saat hendak membuat keputusan investasi misalnya dalam menilai efisiensi operasi, tata kelola perusahaan maupun penilaian keberlangsungan perusahaan tersebut.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan adanya penilaian yang lebih rinci agar ada nilai pembeda antar entitas. Gagasan alternatif penilaian ini dibuat dengan menggabungkan penilaian kualitatif yang dikuantifikasi agar skor akhir dapat diperbandingkan. Penilaian ini merupakan modifikasi dari *maturity model* dan prinsip pengendalian intern versi COSO dengan rincian modifikasi sebagai berikut:

1. Skor hanya nol sampai dengan dua.
2. Indikator penilaian bersumber dari enam atribut Maturity Model Cobit 4.1 yang dimodifikasi menjadi tujuh atribut, dan ditambahkan dengan tiga tujuan Pengendalian Intern versi COSO. Ke-sepuluh indikator penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.
3. Komponen penilaian menggunakan 24 prinsip yang dirinci dengan 100 indikator yang bersumber dari COBIT, COSO IC dan COSO ICFR SME.

Modifikasi atas berbagai sumber literature tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di Indonesia, sehingga dari 20 Prinsip COSO SME terdapat prinsip yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kondisi usaha mikro, yaitu: Board of Director dan Financial Reporting Systems.

Tabel 1. Indikator Penilaian untuk Penilaian Pengendalian Intern Usaha Mikro

No.	Indikator	Penjelasan
1	Kesadaran	Kesadaran perlunya tindakan pengamanan untuk mendukung pengendalian intern
2	Komunikasi	Komunikasi antara berbagai pihak yang berhubungan
3	Kebijakan	Penetapan dan penerapan kebijakan perusahaan
4	Prosedur	Penetapan dan penerapan prosedur operasi
5	Tanggungjawab	Tanggung jawab untuk proses bisnis tertentu
6	Penetapan tujuan	Penetapan tujuan suatu proses bisnis
7	Pengukuran Kinerja	Pengukuran kinerja dari suatu proses bisnis
8	Efektivitas Operasi	Penilaian ketercapaian tujuan.
9	Efisiensi Operasi	Penilaian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.
10	Kesesuaian dengan aturan dan regulasi	Penilaian kesesuaian dengan aturan dan regulasi, baik aturan internal maupun regulasi yang berlaku di tempat suatu organisasi beroperasi.

Model penilaian penerapan pengendalian intern pada usaha mikro dibuat berdasarkan *Maturity Assessment Model* untuk level penilaian nol, satu dan dua. Rubrik skor generik untuk setiap indikator dapat dilihat seperti pada lampiran 1.

Komponen Penilaian

Komponen penilaian untuk Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro dibagi menjadi lima domain, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Aktivitas Pengendalian; 4. Informasi dan Komunikasi; dan 5. Pengawasan. Penjelasan lengkap dari setiap komponen tersebut dibahas dalam bagian masing-masing sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi penerapan pengendalian intern secara keseluruhan. Oleh karenanya, komponen ini harus menjadi penekanan, baik bagi yang merancang, menerapkan maupun menilai penerapan pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro, komponen ini memiliki indikator yang lebih banyak dari komponen yang lain.

Prinsip yang diterapkan untuk Penilaian Pengendalian Intern – Lingkungan Pengendalian untuk Usaha Mikro adalah:

- a. Integritas dan nilai etis;
- b. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen;
- c. Otoritas dan Tanggungjawab; dan
- d. Sumber Daya Manusia.

1.1.Lingkungan Pengendalian - Integritas dan Nilai Etis

Integritas dan nilai etis dapat dinilai dengan menggunakan delapan indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan;
4. Tanggung jawab;
5. Pengukuran Kinerja;
6. Efektivitas Operasi;
7. Efisiensi Operasi; dan
8. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

1.2.Lingkungan Pengendalian - Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen dapat dinilai dengan menggunakan delapan indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan;
4. Tanggung jawab;
5. Penetapan tujuan;
6. Efektivitas Operasi;
7. Efisiensi Operasi; dan
8. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

1.3.Lingkungan Pengendalian - Otoritas dan Tanggungjawab

Otoritas dan Tanggungjawab dapat dinilai dengan menggunakan sembilan indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan;
4. Tanggung jawab;
5. Penetapan tujuan;
6. Pengukuran Kinerja;
7. Efektivitas Operasi;
8. Efisiensi Operasi; dan
9. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

1.4.Lingkungan Pengendalian – Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dapat dinilai dengan menggunakan 12 indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan;
4. Prosedur;
5. Alat;
6. Tanggung jawab;
7. Penetapan tujuan;
8. Pengukuran Kinerja;
9. Efektivitas Operasi;
10. Efisiensi Operasi;
11. Keandalan Laporan; dan
12. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan komponen yang menekankan pada pengelolaan risiko, yang dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Prinsip yang diterapkan untuk Penilaian Pengendalian Intern – Penilaian Risiko untuk Usaha Mikro adalah:

- a. Identifikasi dan Analisis Risiko;
- b. Penilaian Risiko Fraud; dan
- c. Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan.

2.1.Penilaian Risiko - Identifikasi dan Analisis Risiko

Identifikasi dan Analisis Risiko dinilai dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan; dan
4. Tanggungjawab.

2.2.Penilaian Risiko – Penilaian Risiko *Fraud*

Penilaian Risiko Fraud dinilai dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Kebijakan; dan
3. Tanggungjawab.

2.3. Penilaian Risiko - Identifikasi dan Analisis Perubahan Signifikan

Identifikasi dan Analisis Risiko dinilai dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan; dan
4. Tanggungjawab.

3. Aktivitas Pengendalian

Komponen Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Bagi usaha mikro, aktivitas pengendalian merupakan komponen pengendalian intern yang paling mungkin dan efisien untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, dalam Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro, komponen ini merupakan komponen dengan indikator kedua terbanyak. Aktivitas pengendalian memiliki 12 prinsip dan 36 indikator. Prinsip yang diterapkan untuk Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro – Aktivitas Pengendalian adalah:

- a. Integrasi Aktivitas Pengendalian Risiko dengan Penilaian Risiko;
- b. Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Intern;
- c. Pengendalian Teknologi Informasi; dan
- d. Pemilihan dan Pengembangan Aktivitas Pengendalian.

Pemilihan dan Pengembangan Aktivitas Pengendalian merupakan subkomponen yang paling mungkin diamati dan juga paling memungkinkan dilaksanakan oleh usaha mikro. Oleh karenanya subkomponen ini dirinci lagi menjadi 11 indikator tambahan.

3.1. Aktivitas Pengendalian – Integrasi Aktivitas Pengendalian Risiko dengan Penilaian Risiko

Prinsip “Integrasi Aktivitas Pengendalian Risiko dengan Penilaian Risiko” menjelaskan berbagai tindakan pengamanan dengan pertimbangan risiko yang akan membantu tercapainya tujuan pengendalian intern. Karakteristik yang berhubungan dengan prinsip ini adalah:

1. Mitigasi risiko,
2. Mempertimbangkan risiko pencatatan, dan
3. Mempertimbangkan teknologi informasi. Integrasi dengan Penilaian Risiko dapat dinilai dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:
 - a. Kesadaran;
 - b. Komunikasi; dan
 - b. Kebijakan.

3.2. Aktivitas Pengendalian – Pemilihan dan Pengembangan Tindakan Pengendalian Intern

Prinsip “Pemilihan dan Pengembangan Tindakan Pengendalian” menjelaskan aktivitas pengendalian yang dipilih dan dikembangkan dengan mempertimbangkan biaya dan efektivitas dalam menurunkan risiko untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Karakteristik yang berhubungan dengan prinsip ini adalah:

1. Mempertimbangkan berbagai aktivitas pengendalian (termasuk di dalamnya: persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas kinerja operasional, dan pengamanan asset),
2. Meliputi *preventive control* dan *detective control*,
3. Pemisahan fungsi, dan
4. Mempertimbangkan *cost* dengan *benefit*.

Pemilihan dan Pengembangan Tindakan Pengendalian Intern dibagi menjadi 11 subkomponen sebagai berikut:

1. Otorisasi atas Transaksi;
2. Pemisahan Fungsi Pencatatan, Penyimpanan dan Otorisasi;
3. Penggunaan Dokumen dan Catatan;
4. Pembuatan dan Penegakan Aturan dan Kebijakan;
5. Pencatatan Aset yang Akurat;
6. Pembatasan Akses ke Aset;
7. Perlindungan Catatan dan Dokumen;
8. Pemeriksaan oleh Manajemen;
9. Pemeriksaan Analitis;
10. Rekonsiliasi Catatan; dan
11. Perbandingan antara Fisik dan Catatan.

Masing-masing subkomponen dalam komponen Pemilihan dan Pengembangan Tindakan Pengendalian Intern dapat dapat dinilai dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Prosedur; dan
3. Tanggung jawab.

4. Informasi dan Komunikasi

Komponen Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi memiliki tiga prinsip dan 11 indikator. Prinsip yang diterapkan untuk Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro – Informasi dan komunikasi adalah:

- a. Informasi Pengendalian Intern;
- b. Komunikasi Internal, dan
- c. Komunikasi Eksternal.

Selain ke-tiga prinsip tersebut, masih ada satu prinsip lainnya yaitu “Informasi Pelaporan Keuangan”, namun tidak cocok untuk diterapkan pada usaha mikro di Indonesia sehingga tidak dimasukkan dalam Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro.

4.1. Informasi dan Komunikasi – Informasi Pengendalian Intern

Prinsip “Informasi Pengendalian Intern” menjelaskan tentang informasi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi agar komponen pengendalian lainnya dapat

diidentifikasi, diperoleh, digunakan dan didistribusikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan individu untuk melakukan tanggung jawab pengendalian internalnya. Karakteristik yang berhubungan dengan prinsip ini adalah:

1. Perolehan data dan
2. Jaminan kualitas data. Informasi Pengendalian Intern dapat dinilai dengan menggunakan tiga indikator sebagai berikut:
 - a. Kesadaran;
 - b. Komunikasi; dan
 - b. Tanggung jawab.

4.2. Informasi dan Komunikasi – Komunikasi Internal

Prinsip “Komunikasi Internal” mendukung pemahaman dan pelaksanaan tujuan pengendalian intern, proses dan tanggung jawab individu di semua level organisasi. Karakteristik yang berhubungan dengan prinsip ini adalah:

1. Komunikasi dengan karyawan,
2. Komunikasi dengan pemilik, dan
3. Akses Informasi. Komunikasi Internal dapat dinilai dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut:
 - a. Kesadaran;
 - b. Komunikasi;
 - c. Kebijakan; dan
 - b. Tanggung jawab.

4.3. Informasi dan Komunikasi - Komunikasi Eksternal

Prinsip “Komunikasi Eksternal” merupakan berbagai komunikasi kepada berbagai pihak yang berhubungan di luar organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Karakteristik yang berhubungan dengan prinsip ini adalah:

1. Penyediaan input dan
2. Penilaian Independen.
3. Komunikasi Eksternal dapat dinilai dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut:
 - a. Kesadaran;
 - b. Komunikasi;
 - c. Kebijakan; dan
 - d. Tanggung jawab.

5. Pengawasan

Komponen Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro yang terakhir adalah Pengawasan. Pengawasan memiliki dua prinsip dan sembilan indikator. Prinsip yang diterapkan untuk Penilaian Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro – Pengawasan adalah:

- a. Evaluasi Melekat dan Evaluasi Terpisah; serta
- b. Pelaporan Kelemahan Pengendalian Intern.

5.1. Pengawasan - Evaluasi Melekat dan Evaluasi Terpisah

Evaluasi Melekat dan Evaluasi Terpisah dinilai dengan menggunakan empat indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Kebijakan;
3. Tanggung jawab; dan
4. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

5.2. Pengawasan - Pelaporan Kelemahan Pengendalian Intern

Pelaporan Kelemahan Pengendalian Intern dinilai dengan menggunakan lima indikator sebagai berikut:

1. Kesadaran;
2. Komunikasi;
3. Kebijakan;
4. Tanggung jawab; dan
5. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi.

Langkah Penggunaan Model

Langkah Penggunaan Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1. Lakukan pengecekan kriteria besaran usaha.
Pengecekan kriteria besaran usaha dilakukan dengan memeriksa apakah skala usaha suatu entitas dapat digolongkan sebagai usaha mikro (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000., dan jumlah karyawan maksimal sembilan orang).
2. Lakukan Maturity Assessment Model.
Apabila dua dari tiga syarat sebagai usaha mikro dalam langkah pertama tidak terpenuhi, maka harus melakukan langkah kedua, yaitu melakukan pengecekan posisi penerapan pengendalian internal menggunakan Maturity Assessment Model dengan enam level pengukuran.
3. Dari hasil penilaian tersebut, jika sebaran nilai antara nol sampai dengan dua, lakukan penilaian lanjutan dengan Maturity Assessment Model yang dimodifikasi, yaitu Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro.
4. Skor yang diperoleh dari pengukuran menggunakan Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro adalah antara 0-100. Pembuat keputusan, misalnya calon investor atau kreditor dapat membandingkan nilai ini antar usaha mikro. Pemilik usaha mikro dapat membandingkan nilai ini antar tahun untuk melihat perkembangan posisi kematangan penerapan pengendalian intern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemodelan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian pengendalian intern dapat menjadi dasar bagi pihak eksternal yang sedang atau berencana untuk menjalin kerjasama dengan entitas yang dinilai. Misalnya, pada saat hendak memberikan pinjaman, pihak perbankan dapat terbantu dengan adanya skor penilaian atas penerapan pengendalian intern entitas tersebut untuk menilai risiko atas kredit yang akan diberikannya. Bagi investor, informasi penilaian ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung saat hendak

membuat keputusan investasi misalnya dalam menilai efisiensi operasi, tata kelola perusahaan maupun penilaian keberlangsungan perusahaan tersebut

2. Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro dapat diterapkan untuk entitas dengan skala usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000., dan jumlah karyawan maksimal sembilan orang.
3. Skor yang diperoleh dari pengukuran menggunakan Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern untuk Usaha Mikro adalah antara 0-100. Pembuat keputusan, misalnya calon investor atau kreditor dapat membandingkan nilai ini antar usaha mikro. Pemilik usaha mikro dapat membandingkan nilai ini antar tahun untuk melihat perkembangan posisi kematangan penerapan pengendalian intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldridge, C. R., & Colbert, J. L. (1994). Management's Report on Internal Control and the Accountant's Response. *Managerial Auditing Journal*, 9(7), 21-28.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2010). *Accounting Information Systems* (11 ed.). New Jersey: Pearson.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2006). *Internal Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies*. New York: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Hall, J. A. (2008). *Accounting Information Systems* (6 ed.). Ohio: South-Western Cengage Learning.
- International Finance Corporation. (2012). *Measuring Jobs from Micro, Small, and Medium-size Enterprises Financed by IFC Client Financial Institutions*. Washington: World Bank.
- Moeller, R. (2009). *Brink's Modern Internal Auditing - A Common Body of knowledge* (7 ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2009). *Accounting Information System* (11 ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Spira, L. F., & Page, M. (2003). Risk Management- The Reinvention of Internal Control and The Changing Role of Internal Audit. *Accounting< Auditing and Accountanility Journal*, 16(4), 640.
- The IT Governance Institute. (2007). *COBIT 4.1*. Illinois: The IT Governance Institute.
- Vivares, J. A., & Sarache, W. (2018). A Maturity Assessment Model for Manufacturing Systems. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 29(5), 746-767.

Lampiran 1. Rubrik skor generik - Model Penilaian Penerapan Pengendalian Intern pada Usaha Mikro

No.	Indikator	Skor		
		0	1	2
1	Kesadaran	Belum ada kesadaran perlunya tindakan pengamanan untuk mendukung pengendalian intern	Mulai mengenali perlunya tindakan pengamanan untuk mendukung pengendalian intern	Sudah ada kesadaran perlunya tindakan pengamanan untuk mendukung pengendalian intern
2	Komunikasi	Belum ada komunikasi antara manajemen dengan berbagai pihak yang berhubungan	Mulai ada komunikasi yang tidak formal antara manajemen dengan berbagai pihak yang berhubungan	Sudah ada komunikasi antara manajemen dengan berbagai pihak yang berhubungan
3	Kebijakan	Belum ada penetapan dan penerapan kebijakan perusahaan	Kebijakan perusahaan dilakukan kasus per kasus atau berdasarkan improvisasi saja.	Kebijakan mulai dilakukan secara rutin karena adanya keahlian individu dan mulai dilakukan dokumentasi.
4	Prosedur	Belum ada penetapan dan penerapan prosedur operasi	Prosedur perusahaan dilakukan kasus per kasus atau berdasarkan improvisasi saja.	Prosedur mulai dilakukan secara rutin karena adanya keahlian individu dan mulai dilakukan dokumentasi.
5	Tanggungjawab	Belum disadari perlunya diidentifikasi penanggung jawab untuk proses bisnis tertentu	Penanggung jawab untuk proses bisnis tertentu belum teridentifikasi dan tanggung jawab diambil secara inisitif dan reaktif.	Sudah ada yang penanggung jawab informal, namun ketika terjadi masalah, ada kecenderungan saling menyalahkan.

No.	Indikator	Skor		
		0	1	2
6	Penetapan tujuan	Belum ada penetapan tujuan suatu proses bisnis	Sudah ada tujuan namun tidak jelas.	Penetapan tujuan telah dilakukan.
7	Pengukuran kinerja	Belum ada pengukuran kinerja dari suatu proses bisnis	Sudah disadari perlunya ada pengukuran kinerja, namun belum dilaksanakan.	Telah dilakukan pengukuran kinerja keuangan, namun hanya diketahui oleh manajemen puncak.
8	Efektivitas Operasi	Belum ada pemikiran tentang efektivitas operasi.	Pengelolaan untuk menjamin efektivitas operasi mulai dilakukan untuk kasus per kasus atau berdasarkan improvisasi saja.	Pengelolaan untuk menjamin efektivitas operasi mulai dilakukan secara rutin karena adanya keahlian individu dan mulai dilakukan dokumentasi.
9	Efisiensi Operasi	Belum ada pemikiran tentang efisiensi operasi.	Pengelolaan untuk menjamin efisiensi operasi mulai dilakukan untuk kasus per kasus atau berdasarkan improvisasi saja.	Pengelolaan untuk menjamin efisiensi operasi mulai dilakukan secara rutin karena adanya keahlian individu dan mulai dilakukan dokumentasi.
10	Kesesuaian dengan aturan dan regulasi	Belum ada pemikiran tentang kesesuaian operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku.	Mulai ada pemikiran tentang kesesuaian operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku, namun belum dilakukan.	Mulai menyesuaikan operasi perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku, namun berdasarkan intuisi saja.